

**BAHAN KULIAH
SEJARAH POLITIK INDONESIA**

Oleh
Farida Sarimaya

**JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PERNGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Sejarah Politik Indonesia
Sejak Proklamasi Kemerdekaan RI
Tanggal 17 Agustus 1945

Periodisasi Sejarah Politik Indonesia

1. Masa Proklamasi Kemerdekaan - Pengakuan kedaulatan (1945-1959)
2. Masa Demokrasi Parlementer (1949-1959)
3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
4. Masa Orde Baru (1966-1998)
5. Masa Reformasi (1999-2004)
6. Masa Demokrasi Konstitusional/Demokrasi Langsung (2004-sekarang)

Masa Proklamasi Kemerdekaan- Pengakuan Kedaulatan (1945-1949)

- Proklamasi Kemerdekaan RI Tanggal 17 Agustus 1945
- Tanggal 18 Agustus 1945 memilih Peresiden, Wapres dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara RI yaitu UUD 1945 dengan bentuk negara Republik Kesatuan
- Terjadi pertempuran-pertempuran melawan Jepang, Inggris, India. Tentara australia mengeluarkan ultimatum melarang semua aktivitas politik misalnya: Demonstrasi, mengibarkan bendera merah putih, rapat-rapat pemimpin Republik, juga menolak ajakan berunding dengan pasukan pendudukan Australia, berdirinya kesatuan-kesatuan tentara.
- Tanggal 5 Oktober maklumat pemerintah berdirinya tentara nasional yang disebut tentara Keamanan Rakyat. Jawa terbentuk 10 divisi dan di Sumatera 6 divisi, dengan pemimpin Soedirman. TKR berubah menjadi TRI (1946), kesatuan di luar TKR

membentuk Biro Perjuangan kedua kelompok tersebut mengintegrasikan diri menjadi TNI (1947), pengakuan Depakto diperoleh, Oktober 1945 setelah pemimpin AFNEI Letjen Sir Philip Christison (Allied Forces Netherlands East Indies) berunding dengan pemimpin RI

- Terjadi perundingan-perundingan antara RI dengan Belanda; Perundingan Linggarjati yang meningkat pada pengakuan Defacto terhadap RI atas Jawa dan Madura
- RI mulai mendapat perhatian Internasional
- Agresi Militer Belanda yang ke-1 Tanggal 21 Juli 1947
- Australia mengusulkan atas dasar pasal 39 Piagam PBB dewan Keamanan agar mengambil tindakan terhadap suatu usaha yang mengancam perdamaian dunia (Sidang Dewan Keamanana PBB tanggal 31 Juli 1947), maka terbentuk KNT (Komisi Tiga Negara), dimana Australia dipilih oleh pemimpin RI sebagai anggota KNT Richard E, Kirby Hakim Mahkamah Arbitrase, dr Persemakmuran Australia sebagai wakilnya
- Perundingan Renville (8 Desember 1947), ditandatangani yang isinya antara lain: gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda
- Agresi Militer Belanda 2 (19 Desember 1948)
Menimbulkan reaksi Internasional antara lain: Komferensi New Delhi: 16 Negara, Asia, Afrika, Arab, dan australia menghasilkan resolusi yang di ajukan pada Sidang Keamanan PBB (28 januari 1949. KTN di ubah namanya menjadi UNCI (United Nation Commision for Indonesia)
- Gangguan keamanan dalam negeri: 18 September di Madiun tokoh PKI memproklamasikan Republik Sovyet Indonesia
- Terbentuk pemerintahan darurat RI berdasarkan mandat Presiden dan Wakil Presiden RI, dimana pemimpinnya Mentri Safrudin Prawira egara di Sumatera.

- Sidang DK PBB (24 Januari 1949), keluar resolusi dari AS yang disetujui oleh semua anggota. Isinya antara lain: Memerintahkan pada KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia Desember 1948.
- Perundingan formal antara RI, BFO dan Belanda dibawah pengawasan komisi PBB dipimpin oleh Critchley di Australia.
- Konferensi Antar Indonesia (19-22 Juli 1949), menghasilkan persetujuan mengenai bentuk dan hal-hal yang berkenaan dengan ketatanegaraan NIS. Antara lain NIS disetujui dengan nama RIS
- KMB (23 Agustus – 2 November 1949) di Den Haag. KMB di ratifikasi oleh KNIP, pada tanggal 15 Desember 1949, terpilih Ir Soekarno sebagai Presiden RIS dengan Moh Hatta sebagai Perdana Mentri..

Pada tanggal 23 Desember 1949 delegasi RIS dibawah pimpinan Moh Hatta ke Netherland untuk menandatangani akte “Penyerahan” kedaulatan dari pemerintah Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara penandatanganan naskah ”peyerahan kedaulatan”

Demokrasi Parleментар (1949-1959)

- Akibat perjanjian KMB terbentuklah negara RIS dengan 16 negara bagian (27 desember 1949)
- Berlakunya UUD konstitusi RIS sejak tanggal 14 Desember 1949 sampai dengan berlakunya UUD 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950, kontitusi ini berlaku sampai tanggal 4 juli 1959
- Pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan resmi RIS dibubarkan dan dibentuk kembali negara kesatuan yang diberi nama Republik Indonesia

- Tidak terdapat stabilitas politik yang ditandai jatuh bangunya kabinet karena adanya mosi tidak percaya sekaligus menjadi ciri-ciri legislatif / DPR kuat.
- Gangguan keamanan di daerah sebagai bentuk ketidak setujuan perjanjian Renville.
- Resionalisasi dan Reorganisasi tentara oleh Drs. Moh Hatta. Resionalisasi itu meliputi penyempurnaan administrasi negara, Angkatan Perang dan aparat ekonomi.
- Pemilu 1955 (29 September 1955) dimenangkan oleh 4 partai yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI untuk memilih anggota DPR.
- Pada tanggal 15 Desember pemilu untuk memilih anggota Konstituante.
- 1957 Presiden Soekarno mengajukan suatu konsepsi yaitu Demokrasi Terpimpin yaitu dibentuknya Kabinet Gotong Royong dan dibentuknya Dewan Nasional. Presiden mengumumkan darurat perang (SOB) bagi seluruh wilayah Indonesia.
- KAA di Bandung pada masa Kabinet Ali Sosroamidjojo J (Juli 1953-juli 1955)
- Gangguan keamanan yang memuncak serta gagalnya persidangan Konstituante, akhirnya berjuang pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959; isinya antara lain: Pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka demokrasi Terpimpin.

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

- 1) Dibentuk Kabinet kerja dan Presiden bertindak selaku Perdana Menteri
- 2) Dengan penetapan Presiden no 2/1959 di bentuk MPRS, DPA, DPR baru diberi nama DPR-GR.

- 3) Manifol RI dijadikan GBHN. Manifol adalah pidato Soekarno yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi kita. Berisi penjelasan tentang Dekrit 4 Juli 1959 dan garis kebijaksanaan dalam sistem Demokrasi Terpimpin. Pidato Soekarno tanggal 30 September dimuka sidang PBB " To build the world anew (membangun dunia kembali), dan pidato tanggal 17 Agustus 1960 "Jalannya Revolusi Kita", dijadikan pedoman-pedoman pelaksanaan Manifol
- 4) Ajaran Nasakom, gagasan Soekarno menguntungkan PKI dan terbentuk tiga kekuatan yaitu Soekarno, PKI dan AD.
- 5) Konfrontasi Indonesia-Malaysia serta gagasan The New Emerging Forces dengan The Old Established Forces serta pembentukan poros Jakarta, Pnom Penh, Hanoi, Pekeng Pyong Yang sebagai poros anti Imperialis dan anti Kolonialis kesemuanya yaitu politik Luar Negeri yang mercu suar dari Soekarno yang mendapat dukungan PKI dan PNI.
- 6) Indonesia keluar dari keanggotaan PBB karena Malaysia diterima menjadi anggota DK PBB (1 Januari 1965)
- 7) Pemberontakan /peristiwa G 30 S 1965 yang menewaskan 6 perwira tinggi AD, kecuali Jenderal A.H Nasution berhasil meloloskan diri.

Masa Orde Baru (1966-1998)

- ❖ Gerakan 30 September 1965 sebelumnya sudah dapat menguasai RRI Pusat dan Gedung PN Telekomunikasi, melalui RRI Letkol Untung menyiarkan pengumuman tentang gerakan 30 September.
- ❖ Selama Orba Gerakan 30 September selalu ditafsirkan pelakuknya adalah PKI, akan tetapi sebenarnya ada versi lain mengenai G 30 S 1965, yang sampai hari ini masih menjadi kontroversi peristiwa G 30 S 1965 yang paling mengemuka adalah PKI. Teori ini jelas

berdasarkan fakta-fakta bahwa surat kabar PKI mendukung gerakan 30 September 1965 (1- 2 Oktober 1965).

- Ketua CC PKI DN Aidit, berada di daerah Halim, dimana para Jenderal dikuburkan.
- Banyak anggota PKI yang menghadiri penculikan dan penawanan di daerah Lubang Buaya seperti Gerwani.
- PKI lah yang bertanggung jawab karena pelaku penculikan adalah Letkol Untung binaan Syam K, anggota CC PKI.

Teori kedua yaitu beranggapan peristiwa G 30 S 1965 kecelakaan sejarah berdasarkan “Cornel Paper“ makalah dari Cornel University yang dibuat oleh Ben Aderson yang mengatakan peristiwa ini sebagai urusan internal AD, peristiwa ini tidak lebih dari Revolusi Tentara AD yang terjadi antara Tentara Muda VS Tua dimana “ nilai-nilai revolusi “ adalah Anak-Bapak (dikutip dari buku R.E. Elson: Profesor pada University Of Guensland Australia.

Teori ketiga diajukan oleh Antonie C.A. Dake dalam buku Soekarno File “Kronologi Suatu Keruntuhan”. Bahwa Soekarno turut bermain dalam peristiwa ini didasarkan pada fakta-fakta antara lain:

Keberadaan Soekarno dipangkalan Udara Halim pada jam 06.00 pagi Soekarno dilaporkan oleh Brigjend Soepardjo terlihat puas, sambil menepuk-nepuk bahu Supardjo ia berkata “ Je hebt goed gedaan (Anda lakukan dengan baik). Kenapa Nasution kok lolos, berdasarkan kesaksian Widjanarko yang baru tiba di Halim sekitar pukul 11.30 (hal 117). Keberadaan Soekarno di Halim menurut Dake jelas membuatnya tak mungkin lolos dari keterlibatan dalam G 30 S 1965.

Teori keempat mengatakan AS dan CIA lah yang turut bertanggung jawab pada peristiwa G 30 S 1965 dan pada kejatuhan Soekarno.

Dimulai pada tahun 1956 pada saat diutuskan “Demokrasi Terpimpin” Teori ini diajukan oleh Peter Dale Scot, dikuatkan oleh Marshall green bahwa AS terlibat dalam peristiwa itu. Dokumen Gilehrst adalah rekayasa CIA dan Inggris. Bukti-buktinya antara lain: AS banyak memberikan alat militer seperti handy talky

Teori kelima adalah yang menganggap Soeharto ada dibalik peristiwa G 30 S yang diajukan oleh Ben Andirson dan Kol Latief. Fakta yang menjadi dasar adalah pelaku penculikan anak buahnya Soeharto, pengakuan Latief, ia datang ke rumah Soeharto melaporkan peristiwa penculikan reaksinya hanya manggut-manggut dan tersenyum. Soeharto menggantikan Ahmad Yani sebagai Menpangad dan menjadi Presiden

Teori lain yaitu teori konspirasi yang yakin bahwa pelaku peristiwa G 30 S 1965 tidak tunggal. Dia mengajukan tiga konspirasi utama yaitu Soekarno dan PKI serta Angkatan Darat.

- ❖ Super semar adalah surat mandat yang dilakukan oleh Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 diberikan pada Soeharto selaku Pangkostrad. Surat ini dijadikan pijakan untuk membubarkan PKI sekaligus legitimasi kekuasaan pemerintahan Orde Baru.
- ❖ Pidato Nawaksara : judul pidato Soekarno dalam rangka menjelaskan /mempertanggung jawabkan peristiwa G 30 S 1965 beserta segala keadaan yang terjadi pada tahun-tahun 1965-an, pidato ini ditolak oleh sidang MPRS.
- ❖ Kebijakan politik Orba: Penyederhanaan partai setelah pemilu 1971, NKK, BKK dalam rangka depolitisasi mahasiswa, kebijakan politik masa mengambang “Floating Mass” pendekatan stabilitas keamanan dan ketertiban serta represif, pengontrolan kekuatan oposisi atau yang tidak sejalan dengan pemerintahan diberlakukan UU Subversif, Idiologisasi Asas tunggal Pancasila, Dwifungsi ABRI yang memungkinkan ABRI berkiprah di semua aspek kehidupan.

- ❖ Militer menjadi kekuatan dominan dalam menentukan arah serta sistem politik yang dibangun oleh pemerintah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.
- ❖ Dikenal 3 jalur untuk mencapai kekuasaan yaitu ABRI, Golkar dan Soeharto.